

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas (Kadin). Kadin berkedudukan di bawah bupati serta bertanggung jawab langsung pada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

- 1) Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- 2) Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi-setingginya
- 3) Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- 4) Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

- 5) Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
- 6) Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
- 7) Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

2.1.2 Definisi Bangunan Gedung Negara dan Gedung Perkantoran

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara Berdasarkan Tingkat Kompleksitas terdiri dari 3 tingkatan, yaitu:

a) Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan Gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- 1) Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²;
- 2) Bangunan rumah dinas tipe c, d, dan e yang tidak bertingkat;
- 3) Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
- 4) Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

b) Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

- 1) Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- 2) Bangunan rumah dinas tipe a dan b; atau rumah dinas c, d, dan e yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- 3) Gedung rumah sakit klas a, b, c, dan d;
- 4) Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai

c) Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan Gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:

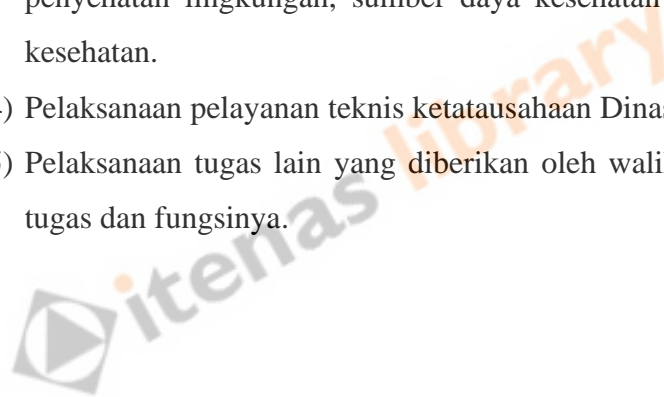
- 1) Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
- 2) Wisma negara;
- 3) Gedung instalasi nuklir;
- 4) Gedung instalasi
- 5) Pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
- 6) Gedung laboratorium;
- 7) Gedung terminal udara/laut/darat;
- 8) Stasiun kereta api;

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan dinas daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan tanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris daerah dan pada Paragraf 2 pasal 5 Tugas Pokok Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a) Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan pan pelayanan umum di bidang kesehatan
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
 - 4) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.4 Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Terdapat beberapa persyaratan maupun standarisasi sarana dan prasarana untuk bangunan Dinas Kesehatan. Berikut Persyaratan pada bangunan untuk Dinas Kesehatan meliputi:

A. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan	Detail
Jarak Antar Bangunan	Minimal 3 meter
Ketinggian Bangunan	Maksimum 8 lantai
Ketinggian Langit-Langit	Min 2.80 meter
KLB , KDB , KDH , GSB	Sesuai ketentuan peraturan daerah setempat
Wujud Arsitektur	Sesuai fungsi dan kaidah arsitektur
Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata , batacco (1/2 batu) , besi baja , kayu
Parkir Kendaraan	Minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung
Aksesibilitas	Tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat
Drainase	Tersedia drainase sesuai sni yang berlaku
Pembuangan Sampah	Tersedia tempat pembuangan sampah sementara
Pembuangan Limbah	Tersedia sarana pengolahan limbah , khususnya untuk limbah berbahaya
Penerangan Halaman	Tersedia penerangan Halaman

B. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan Bahan Bangunan	Detail
Bahan Penutup Lantai	Marmar lokal, Keramik, Vinil, Kayu
Bahan Dinding Luar	Bata, Batako diplester dicat / dilapis keramik, Kaca, Panel Beton Ringan
Bahan Dinding Dalam	Bata, Batako diplester dicat / dilapis keramik, Kaca, Panel gypsum
Bahan Penutup Plafond	Gypsum , Kayu Lapis dicat
Bahan Penutup Atap	Genteng Keramik, Alumunium
Bahan Kusen dan Daun Pintu	Kayu dipelitur, anodized alumunium

C. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan Struktur Bangunan	Detail
Pondasi	Batu belah, kayu, Beton bertulang K-225 atau lebih
Struktur Lantai	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu kelas kuat B
Kolom	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu kelas kuat B
Balok	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja,
Kerangka Atap	baja, kayu kelas kuat B, Baja dilapis anti karat
Kemiringan Atap	Genteng min 30 , sirap min 22,5 , seng min 15

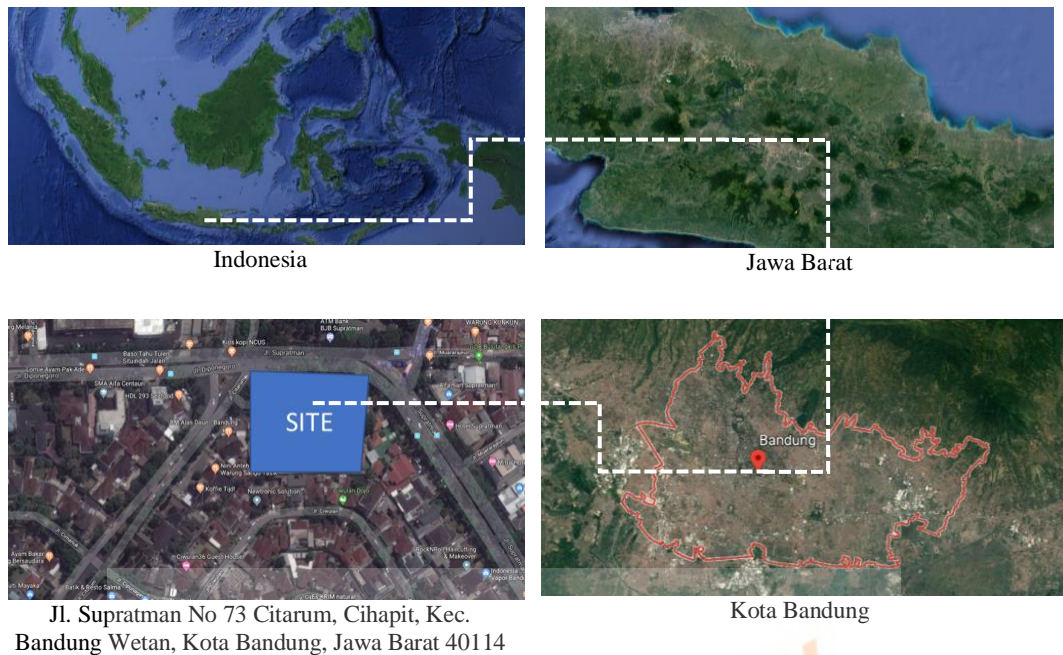
Gambar 2.1 Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Sumber : Data Pribadi 2019

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Deskripsi Proyek

Proyek Kantor Pemerintahan yaitu Kantor Dinas Kesehatan sekaligus PMI yang terletak di Jalan supratman No 73 Citarum kecamatan Bandung Wetan Jawa Barat ini memiliki luas Lahan kurang lebih 11000 m2 dengan fungsi sebagai tempat aktifitas kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung. Lahan Proyek memiliki koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%, Koefisien Luas Bangunan (KLB) sekitar 1.6, dan memiliki Koefisien Dasar Hijau 25% untuk area resapan air. Ilustrasi lokasi Site ada pada gambar **Gambar 3.1**



Gambar 2.2 Lokasi Tapak

Sumber : google maps diakses 1 januari 2020 (diolah)

2.3 Studi Banding

2.3.1 Studi Banding Tema Arsitektur Kontekstual

Studi banding pada tema arsitektur kontekstual ini menggunakan 2 kasus bangunan yang terletak di Kota Bandung dan Kota Jakarta.

a) Bank BJB Braga Kota Bandung

Bangunan ini merupakan salah satu bangunan *art deco* yang ada di Kota Bandung dan sudah menjadi peninggalan dari jaman Belanda yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Sebelum digunakan oleh Bank BJB sebagai kantor pusat, bangunan ini dibuat untuk menjalankan fungsinya sebagai kantor sebuah bank saat pertama kali dibangun pada tahun 1935. Dulu bangunan ini digunakan oleh DENIS (De Erste Nederlandsche Indische Spaarkas en Hypotheekbank) yang merupakan bank hipotek pertama di Bandung. Sebelumnya DENIS telah beroperasi sejak tahun 1915 dengan kantor yang lebih kecil di Jl. Braga. Arsitek yang merancang bangunan ini adalah A.F Aalbers, Arsitek yang sama yang mendesain Hotel Savoy Homann. Kedua bangunan ini dibangun pada

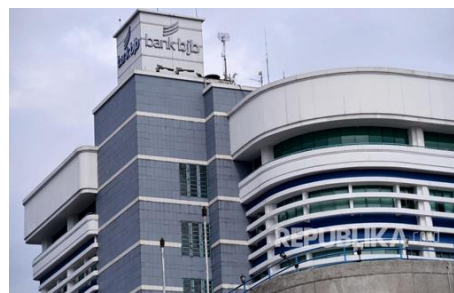
jangka waktu yang hampir bersamaan dengan gaya streamline art deco yang berbentuk garis-garis pada bagian badannya dan memiliki sebuah menara di puncaknya.



Gambar 2.3 Bank BJB, Braga, Kota Bandung

Sumber : <https://situsbudaya.id/sejarah-gedung-bank-bjb-bandung/>
(diakses 1 januari 2020)

Seiring dengan perkembangan jaman, bangunan ini mengalami penambahan massa karena menyesuaikan dengan kebutuhan ruang yang semakin bertambah. Bangunan baru didesain harmonis dengan bangunan lama sehingga terjadi keselarasan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Dapat dilihat pada **gambar 2.4**.



Bank BJB baru



Bank BJB lama (1961)

Gambar 2.4 Bank BJB Lama dan Baru

Sumber : <https://negorijbandoeng.com/bangunan/gedung-kantor-pusat-bank-bjb-megah-dengan-gaya-streamline-art-deco/> (diakses 1 januari 2020)

Pendekatan-pendekatan desain tersebut diantaranya adalah pendekatan melalui aspek fisik dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama. Dapat dilihat pada **gambar 2.5**.



Gambar 2.5 Pendekatan Desain

Sumber : <https://negorijbandoeng.com/bangunan/gedung-kantor-pusat-bank-bjb-megah-dengan-gaya-streamline-art-deco/> (diakses 1 januari 2020)

b) Hotel Grand Indonesia

Hotel Indonesia adalah hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI Pertama, Soekarno untuk menyambut Asian Games IV tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya, Wendy, asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together.



Gambar 2.6 Hotel Grand Indonesia

Sumber : <https://moreproindo.com/investasi-apartemen-mewah-jakarta/> (diakses 1 januari 2020)

Hotel Indonesia pada masanya merupakan hotel termegah di Asia Tenggara dan Hotel ini juga menjadi pusat berbagai kegiatan budaya. Mulai dari acara musikal dan pertunjukan teater secara rutin dipentaskan di hotel. Acara kebudayaan yang rutin digelar telah melambungkan beberapa seniman ternama Indonesia. Dulunya bangunan 16 lantai ini berisi 500 kamar tidur, dan sekarang jumlahnya tak lagi lebih dari 300. Karya seni sejarah selalu menyapa tamu hotel, relief kehidupan Bali pun seluas 68meter dikerjakan oleh 53 seniman hingga kini tetap terjaga pihatannya. Seiring dengan perkembangan jaman, bangunan ini mengalami penambahan massa karena menyesuaikan dengan kebutuhan ruang yang semakin bertambah. Bangunan baru didesain harmonis dengan bangunan lama sehingga terjadi keselarasan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Dapat dilihat pada **gambar 2.7**.



Gedung lama

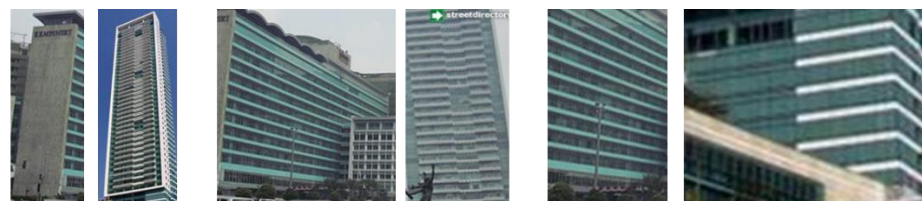
Gedung baru

Gambar 2.7 Gedung Lama dan Gedung Baru Hotel Indonesia

Sumber : <https://moreproindo.com/investasi-apartemen-mewah-jakarta/>

(diakses 1 januari 2020)

Pendekatan-pendekatan desain tersebut diantaranya adalah pendekatan melalui aspek fisik dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama. Dapat dilihat pada **gambar 2.5** dibawah ini.



Bentuk bidang massif

Irama garis horizontal

Warna dari kaca yang senada

Gambar 2.8 Pendekatan Desain

Sumber : <https://moreproindo.com/investasi-apartemen-mewah-jakarta/>

(diakses 1 januari 2020)